

8426-23681-1-CE.docx

by lp3m@unuja.ac.id 1

Submission date: 13-Jun-2024 01:18AM (UTC-0500)

Submission ID: 2376436176

File name: 8426-23681-1-CE.docx (108.08K)

Word count: 4820

Character count: 32223

P-ISSN: ____ ; E-ISSN: ____
TRILOGI, 1(1), Januari-April 2020 (1-24)
@2020 Lembaga Penerbitan, Penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
DOI: <https://doi.org/>

JURNAL
TRILOGI
Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora

Implementasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumberlele

Nourma Ulva Kumala Devi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga
nourmaulva@upm.ac.id

Supriyanto

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga
supriyanto@upm.ac.id

Totok Hariyanto

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga
totokhariyanto1977@gmail.com

Abstract

Poverty is a complex issue that requires effective solutions. The Family Hope Program (PKH) in Sumberlele Village is designed to alleviate poverty through comprehensive policies. This study examines the implementation of PKH and the supporting and inhibiting factors of its success using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method is qualitative descriptive, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consist of PKH participants, PKH facilitators, and village officials. The results indicate that the implementation of PKH in Sumberlele Village has been running well. This is evident from the involvement of aid recipients, PKH facilitators, and the village head who perform their duties according to the Ministry of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 on PKH. However, some beneficiary families do not commit to their obligations, such as not attending posyandu, using educational assistance for other purposes, and not attending monthly group meetings. Supporting factors for PKH implementation include effective communication between facilitators and the community, sufficient financial resources, and the positive attitude of PKH facilitators. The organizational structure of PKH implementation in Sumberlele Village is considered good, supported by the Probolinggo District Social Service and the Standard Operational Procedure (SOP), which ensures time certainty, resources, and standardization in program implementation. The PKH implementation manual, always carried by facilitators, reflects a commitment to the established task standards.

Keywords: Implementation; Family Hope Program (PKH); Poverty Alleviation

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi efektif. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberlele dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dengan kebijakan komprehensif. Penelitian ini mengkaji implementasi PKH dan faktor pendukung serta

penghambat keberhasilannya menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari peserta PKH, pendamping PKH, dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Sumberlele berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat penerima bantuan, pendamping PKH, dan kepala desa yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Namun, sebagian keluarga penerima manfaat tidak berkomitmen terhadap kewajibannya, seperti tidak menghadiri posyandu, menggunakan bantuan pendidikan untuk keperluan lain, dan tidak menghadiri pertemuan kelompok bulanan. Faktor pendukung implementasi PKH meliputi komunikasi efektif antara pendamping dan masyarakat, kecukupan sumber daya finansial, serta sikap positif pendamping PKH. Struktur organisasi implementasi PKH di Desa Sumberlele dinilai baik, dengan dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dan Standard Operational Procedure (SOP) yang memastikan kepastian waktu, sumber daya, dan penyeragaman dalam pelaksanaan program. Buku pedoman pelaksanaan PKH yang selalu dibawa oleh pendamping menunjukkan komitmen terhadap standar pelaksanaan tugas.

Katakunci: Implementasi; Program Keluarga Harapan (PKH); Pengentasan Kemiskinan

1 Pendahuluan

Kemerdekaan bukan hanya bermakna kebebasan dari penjajah, tetapi juga tercapainya masyarakat yang adil dan makmur serta terbebas dari belenggu kemiskinan (Sahib, 2021). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan amanat konstitusi bahwa upaya penganggulangan kemiskinan merupakan perlindungan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Bitan et al., 2023).

Fenomena kemiskinan terus dikaji karena merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Menurut Oscar Lewis, kemiskinan muncul akibat nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurang memiliki etos kerja. Faktor eksternal yang datang dari luar, seperti birokrasi atau peraturan resmi, juga dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya (Afkari et al., 2022). Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental serta fisiknya dalam kelompok tersebut (Arafah, 2022).

Masalah kemiskinan di Indonesia masih sangat signifikan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pemerintah telah mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan dan program-program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar dapat hidup layak dan melakukan fungsi sosialnya dengan baik. Di Kabupaten Probolinggo, kemiskinan masih menjadi problem besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pada tahun 2023, Kabupaten Probolinggo memiliki angka kemiskinan tertinggi ketiga di bawah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, dengan penduduk miskin mencapai 205,02 ribu jiwa atau 17,19% (Devi & Hariyanto, 2024). Dampak dari penyebaran virus COVID-19 juga memperburuk situasi, menyebabkan kesulitan pekerjaan, penghasilan tidak menentu, dan peningkatan angka pengangguran. Di Desa Sumberlele, tingginya pengangguran mengakibatkan banyak warganya bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian lepas. Data DTKS Kemensos menunjukkan angka kemiskinan di Desa Sumberlele sekitar 22% (Rosyid, 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Aeda & Jannah, 2022). PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi

beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, serta menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga (Aeda & Jannah, 2022). Mekanisme pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, yang mencakup tahapan usulan data, verifikasi dan validasi, pengendalian kualitas, penetapan, dan penggunaan data (Devi & Hariyanto, 2024). PKH terus berinovasi dan berkembang, dengan tujuan utama mengentaskan kemiskinan dan menghasilkan keluarga penerima manfaat yang mandiri dan sejahtera.

Data awal menunjukkan jumlah graduasi KPM PKH di Desa Sumberlele meningkat signifikan. Pada tahun 2022, dari 1.615 penduduk, 115 jiwa menerima bantuan PKH (7,13%). Pada tahun 2023, meskipun jumlah penduduk meningkat menjadi 1.635 jiwa, penerima bantuan PKH menurun menjadi 92 jiwa (5,08%) (Juliani et al., 2023). Mayoritas warga Desa Sumberlele bermata pencaharian sebagai buruh tani dan pekerja harian lepas dengan penghasilan yang tidak pasti, sehingga program-program seperti PKH sangat dibutuhkan. PKH mendorong keluarga miskin untuk mengakses pelayanan sosial dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi, serta program perlindungan sosial lainnya. PKH bertujuan menjadi pusat keunggulan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan sinergi berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial secara nasional. Lima komponen dari tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang dibantu oleh PKH adalah pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan (Heru et al., 2022).

PKH memberikan bantuan tunai langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi persyaratan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang meliputi komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan yang diterima oleh setiap KPM sesuai dengan kriteria komponen yang dimiliki. Dengan adanya program PKH, warga Desa Sumberlele terbantu dalam mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan mengubah perilaku keluarga penerima manfaat. Kesejahteraan sosial bertujuan menjadikan kehidupan masyarakat lebih layak, menyediakan kesempatan kerja, keamanan, dan

perlindungan dari ancaman, serta jaminan kehidupan ekonomi produktif dan stabil. Tujuan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasi individu dalam masyarakat, serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi semua kelompok masyarakat (Sudarmanto et al., 2021). Berdasarkan data dari pendamping PKH di Kecamatan Kraksaan, pada tahun 2024, terdapat 60 KPM atau 92 jiwa di Desa Sumberlele yang menerima bantuan PKH. Adapun tabel penerima PKH Desa Sumberlele sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penerima Bantuan PKH Desa Sumberlele Tahun 2024

No	Kriteria Komponen Yang Mendapatkan Bantuan PKH	Jumlah
1	Ibu hamil/menyusui	0
2	Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun	12
3	Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat	26
4	Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat	21
5	Anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat	11
6	Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun	22
7	Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat	0
TOTAL		92

Sumber: Pendamping PKH Desa Sumberlele, 2024

Dari data tabel diatas menunjukkan jumlah penerima bantuan di setiap komponen, akan tetapi data tersebut harus disinkronkan saat kelengkapan apakah data tersebut sesuai atau tidak. Data tersebut disinkronkan dengan Data Pusdatin (Pusat Data Informasi) yang diterima Pendamping PKH dan kemudian divalidasi. Sehingga didapatkan jumlah yang berhak untuk menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai kriteria komponen. Data setiap komponen berbeda tergantung saat validasi di lapangan, prakteknya bisa jadi dalam masing-masing komponen baik itu Pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial ada yang mendapatkan bantuan 2 sampai tiga komponen dalam satu keluarga maka secara otomatis semua mendapatkan bantuan sosial. Sebagai sebuah program yang direncanakan secara terpusat, dalam pelaksanaan terdapat banyak aspek dan pihak yang terlibat. Maka dalam hal ini tidak

menutup kemungkinan akan terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Di Desa Sumberlele, jumlah penerima PKH menurun dari 115 jiwa pada 2022 menjadi 92 jiwa pada 2023, meskipun populasi bertambah. Data penerima bantuan ini harus divalidasi dengan kondisi di lapangan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan.

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu:

1. Penelitian di Negeri Assilulu menunjukkan bahwa PKH belum sepenuhnya efektif hingga 2020, meskipun telah memberikan bantuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Masih ada masalah terkait syarat yang belum terpenuhi oleh sebagian besar masyarakat (Nikmah, 2023).
2. Studi di Desa Bumi Raya menyoroti bahwa meskipun ada peraturan untuk mengentaskan kemiskinan, implementasinya masih belum efektif karena masih banyak peserta yang tidak sadar untuk mundur setelah mencapai kesejahteraan (Ariani et al., 2024).
3. Penelitian di Kecamatan Bukit Kemuning menunjukkan bahwa PKH telah berjalan dengan cukup baik, memberikan manfaat signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi penerima manfaat (JUWITA, 2024).

Penelitian saat ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan PKH di Desa Sumberlele. Tujuannya adalah agar program ini dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan.

2 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi orang-orang yang terlibat dalam program tersebut. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan

dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Saputra, 2024). Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Kemudian, jenis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara deskripsi dan jelas tentang bagaimana program bantuan PKH diimplementasikan di Desa Sumberlele dan bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan di Desa tersebut.

Pemilihan metode penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Anggraeni et al., 2022). Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya (Mariani et al., 2023).

Dalam penelitian deskriptif, penulis akan mencoba untuk melihat kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, dan kemudian diilustrasikan sebagaimana apa adanya. Nana Sudjana dan Ibrahim mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan (Suharyat et al., 2022).

Peneliti memilih penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sumberlele. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini selain untuk menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) juga untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberlele.

Lokasi penelitian merupakan daerah atau tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Lokasi dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu implementasi/pelaksanaan program bantuan PKH.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini menurut (Sugiyono, 2008) adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap relevan memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Pendamping PKH dan Masyarakat penerima bantuan program PKH. sample yang diukur dalam penelitian ini merupakan komponen PKH yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dalam penelitian dilakukan secara deskriptif dalam yang disusun berdasarkan urutan pembahasan yang sudah direncanakan.

2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut teori implementasi kebijakan, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik (Dwi Nurani, 2029).

Sedangkan menurut teori dari George C Edward III seorang teoritikus kebijakan publik berpandangan bahwa implementasi kebijakan sangat penting karena keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi mencakup pertukaran informasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi dana, waktu, dan personel yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap dan motivasi para pelaku kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aturan, prosedur, dan hirarki dalam organisasi pemerintahan (AG. Subarsono, 2018).

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu Implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh orang yang menjalankan kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika orang yang menjalankan kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika orang yang menjalankan kebijakan memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan juga tidak akan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi bertugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keempat variabel implementasi diatas dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu variabel, maka tiga variabel lainnya akan berpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

3 Hasil Dan Pembahasan

3.1 Implementasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumberlele

Implementasi kebijakan publik sering dianggap hanya sebagai tahap pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan. Namun, kenyataannya, tahap implementasi sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan memiliki arti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, implementasi menjadi tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik karena implementasi yang baik dapat memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

1. Program Keluarga Harapan

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan pendamping PKH. Terlebih dahulu saya sebagai seorang peneliti mempersiapkan diri serta beberapa instrument wawancara. Peneliti melakukan observasi awal terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Sumberlele. Proses penelitian ini berupa Observasi, Wawancara langsung dan dokumentasi.

Berdasarkan observasi, kehadiran Program Keluarga Harapan ini ditengah masyarakat miskin sangat membantu dan mengurangi beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti, dalam membiayai sekolah anak-anak, terbantu memenuhi gizi untuk bayi maupun balita dalam pelayanan posyandu. Dengan demikian PKH Merupakan program yang dapat memberikan kesejahteraan untuk Masyarakat Miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Mahtumah sebagai Pendamping PKH Desa Sumberlele yang mengatakan bahwa terdapat tiga program dalam PKH, yaitu: pertama pendidikan, dalam program ini ada komponen yang mencangkup anak sekolah SD.SMP dan SMA. Kedua Kesehatan, dalam program kesehatan komponennya termaksud ibu hamil/nifas, bayi, balita dan anak pra-sekolah. Ketiga Kesejahteraan Sosial, komponennya mencakup penyandang disabilitas berat, dan lansia usia 70 tahun keatas.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Kustatyaningsih ia mengatakan bahwa dengan adanya program ini sangat membantu keluarga kami dalam membiayai sekolah anak-anak, dulu beban tanggungan sekolah anak kami yang pertama SMA kelas 2 dan SD, jumlah yang dikeluarkan lumayan besar. Dengan adanya PKH

ini dapat membantu kami untuk kebutuhan sekolah anak.

Senada seperti yang diatas, hasil wawancara peneliti dengan ibu Wiwin Yuliani ia mengatakan bahwa dengan adanya PKH sangat membantu keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang sangat baik buat anaknya, karena selain mendapatkan pelayanan dari posyandu bantuan PKH juga dapat membantu pemenuhan kebutuhan untuk balita saya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aesya Sipak Iya mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari PKH ada dalam bentuk tunai dan non-tunai. Walaupun dalam bentuk non-tunai keluarga kami sangat sangatlah senang karena bisa merasakan manfaat dari dari program ini. Karena dengan uang tersebut dapat membantu untuk membiayai keperluan sekolah anak saya.

Dari beberapa hasil wawancara yang dimulai dari pihak pendamping PKH, jawaban yang sama juga diutarakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainya seperti ibu Upaida, ibu Muntiari, dan ibu Musiran. Jawaban semuanya tetap sama, hanya saja dengan penjelasan bahasa yang berbeda, seperti jawaban yang telah dijelaskan diatas penulis dapat mengetahui dan memahami betul mengenai apa saja program keluarga harapan ini dalam pengentasan kemiskinan. Adapun berupa program yang diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH ini dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat itu sendiri dan mendapatkan layanan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhan mereka. Terdapat tiga program dari PKH untuk masyarakat penerima bantuan sosial PKH.

Pertama Pendidikan, dimana semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas untuk kehidupan mereka dan membangun prestasi untuk kemajuan Bangsa ini. Program PKH ini sangatlah membantu dan memberi dampak yang sangat positif didunia baik pendidikan untuk mendorong anak untuk sekolah SD, SMP dan SMA.

Kedua kesehatan, sama halnya dengan pendidikan kesehatan sangatlah diperhatikan karena kesehatan itu sangat berharga bagi kehidupan kita. Maka dari itu diperlukan tingkat pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dengan rendahnya penghasilan sehingga menyebabkan keluarga yang kurang mampu tidak bisa memenuhi kubutuhan kesehatannya dengan sangat baik. Dengan

hadirnya PKH program ini berusaha untuk meringankan dan meningkatkan kesehatan pada ibu hamil agar proses kesehatannya selalu terjaga dengan baik.

Ketiga kesejahteraan sosial, permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang sejauh ini mengakibatkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya karena belum memperoleh pelayanan sosial dengan baik. Hadirnya program PKH ini dapat memperhatikan proses kesejahteraan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang layak serta memenuhi hak atas kebutuhan masyarakat demi tercapainya kebutuhan sosial.

Ibu Siti Mahtumah selaku pendamping PKH, mengatakan bahwa, menurut nya PKH adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat mampu, dan perubahan pola pikir sangat mempengaruhi dalam dalam PKH. Karna PKH tidak hanya program keluarga harapan saja tetapi bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang tidak bergantung ke program tetapi bagaimana juga bisa untuk lebih mandiri. Imbuhnya sejak 2017 Masyarakat Desa sumberlele mendapatkan bantuan PKH berbagai macam kegiatan dan inovasi dalam prakteknya yang dilakukan Pendamping PKH untuk merubah pola pikir masyarakat miskin agar menjadi keluarga sejahtera. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan Setiap bulannya 3-4 kali pertemuan oleh pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat PKH.

Nominal bantuan yang diberikan kepada KPM bervariasi tergantung komponen syarat PKH yang dimiliki dan dibagikan 3 bulan sekali, Pertama pendidikan bantuan yang didapat untuk pendidikan berjumlah untuk masing-masing sekolah seperti SD: Rp 225.000, SMP: Rp 375.000, SMA: Rp 500.000, sehingga dari uang inilah para orang tua bisa membiayai anaknya yang sedang sekolah seperti membayar uang SPP, beli peralatan menuli, seragam dan lain-lain, Sehingga anak bisa sekolah dengan baik. Manfaat dari uang yang didapatkan bertujuan untuk meringankan orang tua untuk membiayai keperluan anak sekolah.

kedua kesehatan, merujuk pada kategori ibu hamil dan balita nominal bantuan yang diterima sebesar Rp 300.000. Ketiga kesejahteraan sosial, merujuk pada kategori lansia dan disabilitas berat nominal bantuan yang diterima Rp 600.000. Dalam melakukan penelitian ini ibu Siti Mahtumah mengatakan bahwa yang berperan atau terlibat dalam program PKH ini adalah pendamping dan pemerintah Desa Sumberlele. Karena pemerintah

merupakan *stackholder* dari program ini sehingga harus ada nya kerjasama antara keduanya.

Pendamping PKH ibu Siti Mahtumah mengatakan bahwa jika terdapat penyalagunaan dalam menerima bantuan PKH maka orang tersebut akan diberikan sanksi berupa surat peringatan dan pendamping akan turun langsung kerumah-rumah keluarga penerima manfaat KPM karena uang itu hanya untuk keperluan sekolah anak, orang tua hanyalah pengurus yang mengurus untuk kebutuhan sekolah anak.

Keinginan dari pendamping PKH sangat menginginkan program keluarga harapan ini berhasil, dalam arti ketika pemerintah memberikan bantuan harus adanya timbal balik dari masyarakat ke pemerintah dalam hal ini apa yang suda diaturkan dalam program ini harus dilaksanakan misalnya P2K2 Setiap bulan. Jadi yang di ingikan dari ibu Siti Mahtumah selaku pendamping PKH jangan saja hanya mendapatkan hak tetapi kewajiban tidak dijalankan.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi program PKH dalam mengentaskan kemiskinan sesuai teori dari George C Edward III yaitu, dapat dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur organisasi.

1. Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana (George C Edward III dalam Deddy 2016:58). Komunikasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial kepada petugas dan pendamping PKH Kabupaten Probolinggo khususnya pendamping PKH Desa Sumberlele sudah baik dan jelas. Informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial berhubungan dengan pelaksanaan PKH di lapangan. Selain itu juga berhubungan dengan penambahan dan pengurangan masyarakat yang menerima bantuan PKH. Namun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKH di Desa Sumberlele yaitu yaitu kurangnya kemampuan keluarga penerima manfaat dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendamping PKH. Hal ini terlihat ketika pertemuan kelompok yang membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, banyak dari keluarga penerima manfaat yang tidak mengingat materi yang disampaikan sebelumnya oleh pendamping PKH. Penyampaian informasi tentang penyaluran dana PKH akan sangat diingat dan dipahami oleh keluarga penerima manfaat.

2. Sumber Daya

Menurut George C Edward III dalam Oktaviani dan Muchtar (2019:264) sumber daya merupakan hal yang penting dalam suatu program atau kebijakan baik itu sumber daya manusia maupun non manusia yaitu meliputi staf dan fasilitas yang cukup dalam menunjang pelaksanaan program. Apabila implementasi kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan efektif (George C Edward III dalam Alman 2018:4). Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil penelitian, sumber daya dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Sumberlele sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari aktifitas Pendamping PKH saat memecahkan masalah KPM yang terjadi seperti kehilangan Kartu ATM penyaluran bantuan. Sehingga dalam pelaksanaan bantuan PKH berjalan lancar.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokratis (George C Edward III dalam Alman 2018:4). Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai peraturan yang ditetapkan (Oktavia, 2018:7).

Sikap Pendamping PKH yang bertugas mendampingi Keluarga Penerima manfaat sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan pendamping dalam mendampingi keluarga penerima manfaat dalam pertemuan kelompok. Namun yang menjadi hambatan dalam keberhasilan implementasi ini yaitu kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Hal ini dapat dilihat ketika masih ada sebagian yang tidak menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan sebulan sekali, kadang terlambat datang ketika pertemuan, tidak menghadiri posyandu, tidak menggunakan dana bantuan sebagaimana mestinya seperti dana bantuan untuk pendidikan anak dibelikan ke hal lain yang bukan kebutuhan pendidikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan. Struktur Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi suatu kebijakan (Oktavia, 2018:7) dalam

implementasi PKH di Desa Sumberlele struktur organisasi sudah baik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dibentuk dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sehingga jelas bagi pelaksanaannya. Selain itu juga terdapat *Standard Operational Procedur* (SOP) yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal terhadap kepastian waktu, sumber daya dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. *Standard Operational Procedur* (SOP) dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sumberlele sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya buku pedoman pelaksanaan PKH yang selalu dibawa oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya.

4 Kesimpulan

Implementasi Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, telah berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 serta buku pedoman pelaksanaan PKH. Proses implementasi PKH di Desa Sumberlele dievaluasi melalui tiga tahapan: pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Komunikasi dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi oleh Dinas Sosial, Sekretariat UPPKH, dan Pendamping PKH telah dilakukan dengan baik melalui rapat di kantor Dinas Sosial. Namun, beberapa keluarga penerima manfaat (KPM), terutama lansia, masih belum sepenuhnya memahami informasi yang disampaikan. Sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan PKH sudah memadai dan mendukung kelancaran program. Sikap pelaksana dalam implementasi PKH sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap tujuan program. Struktur organisasi dalam implementasi PKH di Desa Sumberlele sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), memastikan bahwa proses administrasi dan operasional berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, implementasi PKH di Desa Sumberlele telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman informasi oleh beberapa KPM. Upaya peningkatan komunikasi yang lebih efektif, terutama untuk lansia, dapat lebih diutamakan untuk memastikan semua penerima manfaat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

5 Daftar Pustaka

- Aeda, N., & Jannah, R. (2022). Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 165–186.
- Afkari, S. G., Subekti, H. I., Suadun, J., Parida, P., Aziwanto, J., Maisah, M., & Jamrizal, J. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia di Madrasah. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 498–513.
- Anggraeni, P. N., Herdiani, S., Rustini, T., & Arifin, M. H. (2022). Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Perkembangan Sosial Anak. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(1), 144–147.
- Arafah, M. (2022). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(2), 88–98.
- Ariani, M., Romdoni, M., Salong, A., Sya'rani, R., Judijanto, L., Masturoh, I., Nurjanah, N., Fatmawati, F., & Dhanarto, P. A. Y. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi: Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bitan, I. A. U., Sasa, S. F., Nisa, N. D., & Santoso, G. (2023). Memaknai Kembali Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Nasionalisme Indonesia pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 294–313.
- Devi, N. U. K., & Hariyanto, T. (2024). IMPLEMENTASI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SUMBERLELE. *Inovasi Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2).
- Heru, M. H. W., Jatmiko, A. R., & Rohman, M. F. (2022). ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (PKM) DI KABUPATEN JOMBANG: Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan. *EBA Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting*, 9(2), 27–45.
- Juliani, R., Aneta, Y., & Tui, F. P. D. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Dulupi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3373–3382.
- JUWITA, Y. (2024). *TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Mariani, W. E., Dana, M. A., & Cahyani, N. K. I. (2023). Investasi Resiko Rendah Reksadana Untuk Generasi Z. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 25–30.
- Nikmah, N. M. (2023). *...(TAMBAHKAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI THESIS DENGAN TTD ASLI BUKAN SCAN, UPLOAD ULANG).. Pengelolaan Keuangan Pada Bantuan Program Keluarga Harapan PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Temon, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Rosyid, M. I. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lebak. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 85–98.
- Sahib, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Maqrizi: Journal Of Economics And Islamic Economics*, 1(2), 1–13.
- Saputra, A. (2024). Upaya Mengurangi Prokrastinasi Akademik Dengan Bimbingan Klasikal Pada Siswa MTSN 1 Payakumbuh. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 316–319.
- Sudarmanto, K., Suryanto, B., Junaidi, M., & Sadono, B. (2021). Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 702–713.
- Suharyat, Y., Ghofur, A., & Abdullah, A. (2022). Pendidikan Rabbani dalam Al-Qur'an. *Al-*

Liqa: Jurnal Pendidikan Islam, 7(2), 101–113.

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

45%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

13%

2

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

13%

Exclude quotes On

Exclude matches < 13%

Exclude bibliography On